

Harga Mati untuk Korupsi

Oleh: Vebbi Andra, M.Pd.

"RASA hati ingin memeluk gunung apa daya tangan tak sampai..."

BEGINILAH gambaran yang dapat diungkapkan melihat fenomena korupsi yang terjadi di negeri ini. Di mana antara harapan dan kenyataan yang terjadi sungguh berbanding terbalik, di satu pihak masyarakat sebagai elemen bangsa mempunyai keinginan yang kuat untuk bersih bersih diri dari korupsi, tetapi di pinak lain pejabat sebagai pemegang amanah rakyat tampaknya lebih cenderung menjadikan korupsi sebagai hobi yang sangat digemari."

Siapa lagi yang dapat dijadikan tumpuan dan harapan bagi rakyat di negeri ini, apabila para pejabatnya sendiri sudah menjadikan korupsi sebagai jati diri dan bagian dari profesi. Sikap para pejabat yang cenderung menghalalkan korupsi sebagai suatu hal yang lunrah dan biasa, sungguh dengan nyata telah mencoreng dan mencerdai hati nurani rakyat yang ang paling dalam.

Para pejabat mulai dari akademisi dan poli-

tisi, dari kampus sampai mahkamah tinggi terindikasi terjebak dalam lingkaran korupsi. Pejabat yang diharapkan secara nyata dapat bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata, malah sebaliknya lebih mementingkan kepentingan sendiri daripada kepentingan negeri ini. Oleh karena itu, tidaklah bisa dipungkiri lagi kalau pejabat di Indonesia sangat identik dengan korupsi.

Siapa yang sebenarnya tidak mau menjadi pejabat? Dengan gaji, tunjangan, dan fasilitas yang serba luar biasa dapat diperolehnya dari negara. Sebenarnya selain hak yang sungguh istimewa ini, pejabat pada dasarnya juga mempunyai kewajiban yang tidaklah mudah. Oleh karena itu, dapatlah dipahami bahwa tidak semua orang bisa menjadi pejabat. Pejabat merupakan orang-orang terpilih, yang memiliki tugas dan fungsi pokok sebagai penyelenggara negara, pemerintahan, dan pembangunan.

Dalam sistem ketatanegaraan yang ada, terutama Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 digambarkan, bahwa pembagian jabatan di Indonesia ialah menggunakan prinsip trias politica (separa-

tion of power), yaitu legislatif (rule-making function), eksekutif (rule application function), dan yudikatif (adjudication function). Di mana yang dinamakan pejabat itu adalah orang-orang yang menempati posisi antara lain, yaitu presiden dan wakil presiden; ketua, wakil ketua, dan anggota MPR; ketua, wakil ketua, dan anggota DPR; ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim agung pada MA serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan; ketua, wakil ketua, dan anggota DPA; ketua, wakil ketua, dan anggota BPK; menteri dan jabatan setingkat menteri; kepala perwakilan RI di luar negeri yang berkedudukan sebagai dubes luar biasa dan berkuasa penuh; gubernur dan wakil gubernur; bupati/walikota dan wakil bupati/walikota; dan pejabat lainnya yang ditentukan undang-undang.

Memasuki era keterbukaan seperti saat ini, para pejabat sebagai bagian dari trias politica, ternyata banyak sekali yang terjebak dalam lingkaran korupsi, baik secara individual maupun berjemaah. Pengelolaan uang negara yang tidak transparan merupakan faktor utama dan pertama penyebab para pejabat

terlilit tindak korupsi. Proyek-proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar, diupayakan dikelola melalui lingkungan kerja yang tertutup guna untuk dapat dicurangi. Betul saja akibat dari perbuatan tersebut, hal hasil menimbulkan kesulitan pembangunan, ekonomi, serta membuat kualitas pelayanan dari pemerintahan terpuruk.

Untuk mencegah hal tersebut agar tidak terus berlangsung dan menghantui negeri ini, maka cara satu-satunya yang harus diambil adalah dengan memberikan tindakan keras dan tegas terhadap para pejabat yang melakukan korupsi, yang mana sudah sepantasnyalah para pejabat yang berlaku korup untuk disingkirkan.

Di samping juga, adanya kemauan bersama untuk melakukan tata kelola pemerintahan yang berlandaskan keterbukaan, serta kegiatan pengawasan yang mengikat dan berlapis harus terus dapat ditingkatkan demi menjaga terselenggarakannya pemerintahan yang bersih. Sehingga pada akhirnya, cita-cita untuk melahirkan kehidupan birokrasi Indonesia yang jujur, bersih, dan amanah dapat terwujud dengan baik, sesuai dengan semboyan yang diusung Indonesia dalam niemperingati hari antikorupsi sedunia 'Berani jujur itu hebat', yang mana merupakan suatu bentuk ajakan moral bagi masyarakat Indonesia untuk memerangi korupsi sebagai musuh bersama. (**)

**Sejak jadi pejabat,
makin mewah aja
hidupnya Pak, apa
sih resepnya...**

**Yang penting kita tidak
minta uang ke rakyat
langsung, kita hanya
makan uang negara saja...**



Sehat itu Mahal!

Oleh: Vebbi Andra, M.Pd.
Magister Bidang Pendidikan Bahasa,
Sastra Indonesia dan Daerah

Tangisan untuk Negeri

Hitam negeriku
negeriku, negeri hitam
tidak ada Cahaya di sana
semuanya hitam, kelam tanpa warna

Apakah masih ada cinta di negeriku?
cobalah kau tanya pada kerut
wajah tua di lorong sana
dan dengarkanlah dirinya bercerita
tentang senyum amarah kaum jelata
atau duka nestapa anak-anak para
janda

Oh, kenapa negeriku ini?
sedih terkubur bara lara
terhempas larut gelombang derita
ini pastilah ulah para durjana!
pengisap darah rakyat jelata
pengikis habis jiwa di dada

Tapi apa yang bisa aku buat!
aku hanyalah daun kering
kumpulan sampah tak berguna
hanya bisa bermandi air mata
moga cahaya cinta Tuhan di jiwa
jatuh menembus hati negeriku
yang merana...

BANGSA yang kuat, tentu saja adalah bangsa yang sehat. Begitu besarnya peranan dari kesehatan, sampai-sampai lahir satu semboyan 'lebih baik mencegah dari pada mengobati'. Lahirnya semboyan 'lebih baik mencegah dari pada mengobati' di kalangan masyarakat Indonesia, disebabkan istilah 'sakit' sangat identik dengan biaya yang mahal. Stigma tersebut sungguh telah berkembang luas di dalam masyarakat, dengan perspektif bahwa orang miskin itu dilarang keras untuk

sakit. Hal ini muncul, dikarenakan tidak terjangkaunya biaya kesehatan bagi golongan masyarakat kelas bawah.

Melihat akses masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan begitu terbatas. Maka sudah sepertinya bagi pemimpin yang merakyat, untuk mengedepankan suatu program kesehatan gratis bagi segenap masyarakat.

Melalui program kesehatan gratis ini, diharapkan nantinya masyarakat akan memiliki satu jaminan kesehatan yang dapat digunakan kapan saja dan di mana saja apabila diperlukan, baik di lingkungan rumah sakit maupun di pusat kesehatan masyarakat. Di mana jaminan kesehatan gratis ini, merupakan kunci penting untuk menjamin keberadaan suatu masyarakat Indonesia yang kuat.

Pelayanan Prima

Mewujudkan Indonesia sehat merupakan harapan, dambaan, impian, dan cita-cita kita bersama. Oleh karena itu, untuk mencapai hal tersebut diperlukan suatu terobosan jiu di bidang kesehatan, yaitu berupa reformasi kesehatan. Reformasi kesehatan merupakan cara terbaik untuk mengubah bentuk pelayanan kesehatan yang lemah, menjadi bentuk pelayanan yang prima.

Pelayanan prima (excellent service) merupakan bentuk pelayanan yang paling baik yang dapat diberikan suatu lembaga/organisasi terhadap pihak yang dilayani (pelanggan). Dikatakan paling baik, dikarenakan pelayanan prima yang ada telah memiliki standar pelayanan yang baku dan berlaku secara umum. Di mana pelayanan prima tersebut, pada dasarnya bertujuan untuk dapat memberikan kepuasan yang baik sesuai dengan harapan pelanggan, tanpa ada faktor-faktor yang harus menyulitkan (Sutopo dan Suryanto, 2006).

Lembaga Administrasi Negara (2006) berpandangan, bahwa kriteria-kriteria utama yang harus terlihat dari suatu bentuk pelayanan prima, antara lain:

a) Kesederhanaan, yaitu bahwa tata cara pelayanan dapat diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat, tidak berbelit-betit, serta mudah dipahami dan dilaksanakan oleh pelanggan.

b) Reliabilitas, meliputi konsistensi dari kinerja yang tetap dipertahankan dan

menjaga saling ketergantungan antara pelanggan dengan pihak penyedia pelayanan, seperti menjaga keakuratan perhitungan keuangan, teliti dalam pencatatan, dan tepat dalam hal waktu.

c) Tanggung jawab dari para petugas pelayanan, yang meliputi pelayanan sesuai dengan urutan waktunya, serta menghubungi pelanggan secepatnya apabila terjadi sesuatu yang perlu segera diberitahukan.

d) Kecakapan para petugas pelayanan, yaitu bahwa para petugas pelayanan menguasai keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan.

e) Pendekatan kepada pelanggan dan kemudahan kontak pelanggan dengan petugas, petugas pelayanan harus mudah dihubungi oleh pelanggan, tidak hanya dengan pertemuan secara langsung, tetapi juga melalui telepon atau internet. Oleh karena itu, lokasi dari fasilitas dan operasi pelayanan juga harus diperhatikan.

f) Keramahan, meliputi kesabaran, perhatian, dan persahabatan dalam kontak antara petugas pelayanan dan pelanggan. Keramahan hanya diperlukan jika pelanggan termasuk dalam konsumen konkret. Sebaliknya, pihak penyedia layanan tidak perlu menerapkan keramahan yang berlebihan jika layanan yang diberikan tidak dikonsumsi para pelanggan melalui kontak langsung.

g) Keterbukaan, yaitu bahwa pelanggan bisa mengetahui seluruh informasi yang mereka butuhkan secara mudah dan gamblang, meliputi informasi mengenai tata cara, persyaratan, waktu penyelesaian, biaya, dan lain-lain.

h) Komunikasi antara petugas dan pelanggan, komunikasi yang baik dengan pelanggan adalah bahwa pelanggan tetap memperoleh informasi yang berhak diperolehnya dari penyedia pelayanan dalam bahasa yang mereka mengerti.

i) Kredibilitas, meliputi adanya saling percaya antara pelanggan dan penyedia pelayanan, adanya usaha yang membuat penyedia pelayanan tetap layak dipercaya, adanya kejujuran kepada pelanggan, dan kemampuan

penyedia pelayanan untuk menjaga pelanggan tetap setia.

j) Kejelasan dan kepastian, yaitu mengejelas tata cara, rincian biaya layanan dan tata cara pembayarannya, serta jadwal dan waktu penyelesaian layanan tersebut. Hal ini sangat penting karena pelanggan tidak boleh ragu-ragu terhadap pelayanan yang diberikan.

k) Keamanan, yaitu usaha untuk memberikan rasa aman dan bebas pada pelanggan dari adanya bahaya, resiko, dan keragu-raguan. Jaminan keamanan yang perlu kita berikan berupa keamanan fisik, finansial, dan kepercayaan pada diri sendiri.

l) Mengerti apa yang diharapkan pelanggan, hal ini dapat dilakukan dengan berusaha mengerti apa saja yang dibutuhkan pelanggan. Mengerti apa yang diinginkan pelanggan sebenarnya tidaklah sukar. Dapat dimulai dengan mempelajari kebutuhan-kebutuhan khusus yang diinginkan pelanggan dan memberikan perhatian secara personal.

m) Kenyataan, meliputi bukti-bukti atau wujud nyata dari pelayanan, berupa fasilitas yang baik, adanya petugas yang melayani pelanggan, peralatan yang digunakan dalam memberikan pelayanan, kartu pengenal, dan fasilitas penunjang lainnya.

n) Efisiensi, yaitu bahwa persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan.

o) Ekonomis, yaitu agar pengenaan biaya pelayanan harus ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan nilai barang/jasa dan kemampuan pelanggan untuk membayar.

Melalui pelaksanaan pelayanan prima yang baik, terlihatlah visi dan misi ke depan dari pemimpin yang merakyat guna untuk mewujudkan keberadaan Negara Indonesia yang sehat. Di mana hal tersebut, sungguh sangat berguna untuk menciptakan kehidupan masyarakat Indonesia yang sejahtera sesuai dengan cita-cita Undang-Undang Dasar 1945. (**)

3 Pilar, Pemimpin yang Merakyat!

"Pendidikan, kesehatan, dan ekonomi pada, dari, oleh, dan untuk rakyat. Begitulah sebaiknya tujuan dan tekad hidup dari pemimpin yang merakyat."

Oleh Vebbi Andra, M.Pd.

TENTU saja selama ini banyak masyarakat yang bertanya-tanya, apakah yang menjadi tolak ukur untuk menyatakan suatu pemerintahan dapat digolongkan sebagai good governance atau tidak? Pertanyaan tersebut, sebenarnya sungguh sangat mudah untuk dijawab oleh berbagai elemen aparatur pemerintahan di negara ini.

Suatu pemerintahan dapat digolongkan sebagai good governance, indikatornya sangat jelas ialah apabila pemerintahan itu sendiri dipimpin oleh pemimpin yang merakyat. Dimana sebenarnya pemimpin tersebut, merupakan bagian dari aparatur negara yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata, dalam fungsinya sebagai penyelenggara tugas negara, pemerintah, dan pembangunan.

Mewujudkan good governance bukanlah suatu perkara yang mudah. Oleh karena, hal ini memerlukan suatu komitmen yang kuat, daya tahan yang lama, dan waktu yang tidak singkat dalam proses pembelajaran, pemahaman, serta implementasi dari nilai-nilai tata keperintahan yang ada oleh seluruh elemen bangsa, baik dari aparatur pemerintahan ataupun masyarakat luas. Di samping, perlu adanya kesepakatan bersama dan rasa optimis yang tinggi dari seluruh komponen bangsa, bahwa good governance dapat diwujudkan demi pencapaian masa depan bangsa dan negara yang lebih baik (Soeharyo dan Nasri, 2009).

Wawasan kedepan (visionary), keterbukaan dan transparansi (open-

ness and transparency), partisipasi masyarakat (participation), tanggung gugat (accountability), supremasi hukum (rule of law), demokrasi (democracy), profesionalisme dan kompetensi (professionalism and competency), daya tanggap (responsiveness), keefisienan dan keefektifan (efficiency and effectiveness), desentralisasi (decentralization), kermitraan dengan dunia usaha swasta dan masyarakat (private sector and civil society partnership), komitmen pada pengurangan kesenjangan (commitment to reduce inequality), komitmen pada lingkungan hidup (commitment to environmental protection), dan komitmen pada pasar yang fair (commitment to fair market), merupakan unsur-unsur penting yang harus tergambar dalam suatu good governance (Bappenas).

Di era sekarang ini good governance, yang menggambarkan visi dan misi dari pemimpin yang merakyat, tentu saja tercermin secara keseluruhan melalui tiga pilar pembangunan, yaitu berupa pendidikan gratis, kesehatan gratis, dan ekonomi kerakyatan. Dimana melalui pelaksanaan yang utuh dan menyeluruh terhadap tiga pilar ini, barulah dapat terlihat secara jelas jiwa besar kengarawan yang dimiliki pemimpin yang merakyat.

Pendidikan Gratis

Pendidikan merupakan satu-satunya cara untuk memanusiakan manusia, atau satu-satunya cara untuk membangun manusia seutuhnya. Pendidikan merupakan usaha sadar untuk mempersiapkan manusia, baik dari aspek pengetahuan (kognitif), aspek sikap (afektif), maupun aspek keterampilan (psikomotorik), bagi peranannya nanti di dalam masyarakat, bangsa, dan negara.

Unesco memaparkan bahwa arah pendidikan sebenarnya bertumpu pada learning to know (belajar untuk mengetahui, landasan ilmu pengetahuan), learning to do (belajar untuk bekerja, aplikasi), learning to be (belajar untuk "menjadi", pengalaman potensi diri), dan learning to life together (hidup bermitra dan sekaligus berkompetsi, hidup berdampingan

dan bersahabat antarbangsa).

Begitu pentingnya pendidikan, maka suatu bentuk pemerintahan yang baik (good governance), seharusnya akan mampu memberikan sumbangsih terhadap dunia pendidikan, baik dari segi materil maupun non-materil. Hal ini dikarenakan pendidikan memiliki fungsi yang amat besar untuk memberikan kesadaran kepada manusia tentang kebenaran-kebenaran hidup, memberikan kegembiraan dan kepuasan batin, mampu menunjukkan kehidupan secara universal, dapat memenuhi kebutuhan terhadap naluri keindahan, dapat memberikan penghayatan yang mendalam terhadap apa yang diketahui, dan bahkan dapat menolong manusia itu sendiri menjadi manusia yang berbudaya, yakni manusia yang responsif terhadap nilai-nilai keluhuran budi (Sastrin, 2007).

Melihat sangat besarnya peran pendidikan bagi kepentingan bangsa dan negara, maka sudah patut dan selayaknya bagi pemimpin yang merakyat untuk memunculkan suatu program pemerintah, yang berbasis pada pendidikan gratis bagi segenap elemen bangsa yang menempuh wajib belajar dari jenjang SD (Sekolah Dasar), SMP (Sekolah Menengah Pertama), dan SMA (Sekolah Menengah Atas) sederajat. Hal ini sangat diperlukan untuk menjamin pemerataan dan kesempatan yang sama bagi segenap masyarakat, agar dapat mengenyam pendidikan yang layak sesuai dengan tujuan utama dari Undang-Undang Dasar 1945.

Kesehatan Gratis

Bangsa yang kuat, tentu saja adalah bangsa yang sehat. Begitu besarnya peranan dari kesehatan, sampai-sampai lahir satu semboyan "lebih baik mencegah daripada mengobati". Semboyan ini muncul, dibabarkan istilah "sakit" sangat identik dengan biaya yang mahal. Stigma yang berkembang luas di masyarakat, menyatakan bahwa orang miskin itu dilarang keras untuk sakit. Hal ini muncul, dikarenakan oleh sangat tinggi dan tidak terjangkaunya biaya kesehatan bagi kalangan masyarakat kelas bawah.

Melihat akses masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan begitu sulit dan terbatas. Maka sudah sangat pas dan sepatutnya, bagi pemimpin yang merakyat untuk mengedepankan suatu program kesehatan yang gratis bagi segenap masyarakat.

Melalui program kesehatan gratis ini, diharapkan nantinya masyarakat akan memiliki satu jaminan kesehatan yang lengkap dan dapat digunakan kapan saja apabila diperlukan, baik di tingkat Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) maupun RS (Rumah Sakit). Dimana jaminan kesehatan gratis adalah hal utama dan pertama, serta merupakan kunci penting untuk menjamin keberadaan suatu masyarakat, bangsa, dan negara yang sehat.

Ekonomi Kerakyatan

Pemberdayaan ekonomi merupakan kunci penting keberhasilan dari pembangunan. Ekonomi yang kuat, tentu saja menjadi penopang pembangunan disuatu negara. Agar memunculkan keunggulan ekonomi, maka diperlukan suatu keharusan bagi pemimpin yang merakyat, untuk melahirkan suatu program yang berbasis pada ekonomi kerakyatan.

Ekonomi kerakyatan merupakan program unggulan, guna untuk membangun minat usaha dikalangan masyarakat. Pokok dasar dari pelaksanaan ekonomi kerakyatan adalah berfokus terhadap UKM (Usaha Kecil dan Menengah), yaitu berupa bantuan dana untuk pengembangan UKM sebesar 1 miliar perkelurahan/desa. Dengan berfokus terhadap program ekonomi kerakyatan, diharapkan nantinya masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya, guna untuk memperkuat keberadaan bangsa dan negara yang kuat.

Melalui tiga pilar pembangunan, yaitu pendidikan gratis, kesehatan gratis, dan ekonomi kerakyatan, terlihatlah visi dan misi ke depan dari pemimpin yang merakyat. Dimana hal ini sungguh sangat berguna, untuk melahirkan kehidupan masyarakat yang sejahtera sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa dan negara. (*)